

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan di Indonesia merupakan bentuk permasalahan yang paling signifikan dan dominandihadapi oleh kebijakan pemerintah saat ini. Semua kebijakan dan program yang ditetapkan oleh pemerintah dijalankanmengentaskan kemiskinan di Provinsi Indonesia. Relativitas kemiskinan selalu diidentifikasisebagai masalah utama di negara-negara berkembang karena memaksimalkan kesejahteraan rakyat belum tercapai (Desmawan et al., 2021). Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan yang harus konsisten dilakukan oleh pemerintah. Penanggulangan kemiskinan sebagai bentuk kebijakan pembangunan merupakan tanggung jawab semua elemen baik itu pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa kemampuan keuangan pemerintah dalam mendanai pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan pemahaman tentang peran strategis yang harus dilakukan.

Menurut World Bank (2012), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (acceptabel). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah

pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan.

Tahun 2020 adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan dampak terhadap perekonomian di seluruh negara di dunia terutama Indonesia, sehingga aktivitas ekonomi terganggu dan berimbas pada pengurangan jumlah pekerja, pemutusan hubungan kerja pada sektor-sektor yang paling terdampak pandemi tersebut yang kemudian menimbulkan permasalahan baru seperti pertambahan jumlah penduduk miskin akibat adanya ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup akibat tidak adanya pekerjaan. Peningkatan kesempatan kerja akan mendorong pembangunan ekonomi dan berdampak positif bagi masyarakat Indonesia dengan menciptakan lapangan kerja yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran.

Dilihat dari permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, maka dari itu diperlukan tindakan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan pasar tenaga kerja adalah dengan memperbaiki sistem pengupahan melalui upah minimum. Selain upah ada beberapa hal yang mendapat perhatian dari pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yaitu kualitas sumber daya manusia yang ada melalui penilaian berdasar Indeks Pembangunan Manusia. Menurut teori lingkaran kemiskinan yang di kemukakan Myrdal dalam Damanduri (2010), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan yaitu kesehatan, pendidikan, pendapatan (upah), dan kualitas manusia itu sendiri.

Menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan dalam masyarakat disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran. Angka Kemiskinan dan Pengangguran biasa digunakan untuk melihat bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat. Mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat yaitu salah satu tujuan bangsa ini maka kemiskinan dan pengangguran menjadi sebuah komitmen bersama bagi seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat untuk berupaya keras dalam penanggulangan masalah tersebut. Suatu negara dapat menghasilkan dampak negatif terhadap perekonomian negara disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran.

Dampak dari pengangguran tidak hanya menjadi beban tersendiri namun juga berdampak pada pemerintah, keluarga maupun lingkungan dan lainlain (Amalia, 2012). Biasanya mereka yang dikategorikan miskin (the poor) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) karena juga berkaitan dengan keterbatasan pekerjaan. Pengangguran erat kaitannya dengan kemiskinan. Karena masih banyaknya masyarakat yang menganggur menyebabkan masalah kemiskinan terus meningkat. Angka kemiskinan selalu ada disebabkan oleh sebagian masyarakat masih banyak menganggur sehingga sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Yudha, 2013).

Dalam definisi yang lebih luas, kemiskinan bersifat multidimensional, artinya kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam yang selanjutnya dapat dipandang melalui berbagai aspek. Ditinjau dari aspek primer kemiskinan meliputi miskin terhadap aset, rendahnya partisipasi organisasi sosial politik, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan aspek sekunder mencakup miskin

terhadap jaringan sosial, rendahnya sumber-sumber keuangan dan terbatasnya informasi.

Perkembangan angka kemiskinan di Maluku Utara ternyata jumlah penduduk miskin di Maluku Utara pada September 2022 mencapai 82,13 ribu orang jika di bandingkan dengan September tahun 2021 angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 0,95 ribu orang, sementara di bandingkan dengan maret 2022 terhitung naik sebesar 2,26 ribu orang. Ahli Madya Badan Pusat Statistik Maluku Utara Insaf Santoso mengungkapkan kondisi kemiskinan di Maluku Utara di pengaruhi oleh banyak fenomena sosial yang terjadi selama september 2022. Di antaranya kenaikan BBM, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan dan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada periode Maret 2022 hingga september 2022 jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 3,85 ribu orang sedangkan di pedesaan turun sebesar 1,60 ribu orang.

Dengan memperhatikan komponen garis kemiskinan yang terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan terlihat bahwa komoditi makanan masih jauh lebih besar di bandingkan peranan komoditi bukan makanan. Ia menjelaskan, garis kemiskinan pada september 2022 tercatat sebesar, Rp 544.278,- per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar, Rp 423.139,- atau 77,74 persen dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar, Rp 121.138,- atau 22,26 persen. Sementara beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar, 19,00 persen di perkotaan dan 24,17 persen di pedesaan. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada garis kemiskinan perkotaan dan pedesaan adalah perumahan, listrik, bensin, pendidikan dan perlengkapan mandi.

Kabupaten Kepulauan Sula merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara, dengan ibu kota Sanana terletak paling selatan di wilayah provinsi Maluku Utara. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula terus berbenah untuk menekan tingginya angka kemiskinan yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) meningkat 0,24 persen. Dari sederetan kondisional yang terjadi ternyata tidak seindah jika kita melihat dari sisi lain masyarakatnya yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik dalam data indeks keparahan kemiskinan yang meningkat menjadi 0,24 % pada tahun 2021 dari 0,16 % pada tahun 2020. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula terus berupaya mendorong peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat bisa mengentaskan kemiskinan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Sula (26/01/2023). Saleh, mengatakan bukan hal yang mudah untuk mengentaskan kemiskinan dalam suatu daerah. "Komitmen Pemkab Kepulauan Sula saat ini adalah menatap kedepan demi kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari setiap keputusan, kebijakan maupun pertimbangan prioritas yang akan diambil oleh pemerintah. Kerja sama antara lintas sektor ini sangat penting, sebab jika semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu mengimplementasikan program kerja yang bisa bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat, maka cepat atau lambat bisa mengentaskan kemiskinan. Namun, kata Saleh, operasi pasar itu belum juga menyentuh masyarakat. Pasalnya, hanya sebatas memberikan bantuan kepada masyarakat. "Yang diharapkan masyarakat saat ini penguatan.

Artinya kita harus memberikan sesuatu yang nantinya masyarakat bisa berfikir apa yang didapatkan oleh pemerintah bisa produktif agar bisa membantu ekonomi mereka," kata Saleh. Dikatakannya, saat ini Disprindaskop sudah

membina usaha kecil yang ada di masyarakat. Semua itu dengan tujuan agar bisa mengentaskan kemiskinan. "Masyarakat harus mendatangi Disprindakop dan menanyakan terkait dengan usaha UMKM." Wakil Bupati M.Saleh Marasabessy, menyampaikan jika kemiskinan dalam satu daerah bisa dientaskan oleh daerah, termasuk juga oleh Pemkab Kepulauan Sula, maka daerah tersebut bisa keluar dari kategori status daerah tertinggal.

**Tabel 1.1 Data Tingkat Kemiskinan Di Kabupten Kepulauan Sula
Tahun 2013-2022**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
2013	13.00
2014	12.63
2015	9.02
2016	8.79
2017	8.79
2018	9.19
2019	9.29
2020	8.81
2021	8.36
2022	7.84

Sumber : BPS Kab. Kep Sula (www.bps.go.id)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin tertinggi sebesar 12.63 pada tahun 2014 dan jumlah terendah ada pada tahun 2013 sebesar 13 ribu orang. Penambahan jumlah penduduk miskin ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid 19 yang bukan saja mempengaruhi kesehatan tapi juga dalam hal perekonomian sebab saat covid perekonomian menjadi terhambat, contoh nya saja penambahan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2019 sebesar 9.29 menjadi 8.81 pada tahun 2020 artinya, Potret tingkat keparahan kemiskinan ini merupakan kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan kemiskinan yaitu tingkat upah, pendapatan,

konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, akses terhadap pelayanan kesehatan, kekurangan gizi pada anak dan lain sebagainya. Selain itu indikator tersebut khususnya pada anak dapat menyebabkan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak atau yang biasa disebut dengan anak Stunting, walaupun ada indikator-indikator lain yang dilihat untuk mengatakan bahwa anak tersebut adalah stunting, namun penyebab anak stunting dapat dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan.

Salah satu variabel penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Menurut Harrod-Domar, untuk bisa tumbuh diperlukan adanya investasi yang merupakan tambahan neto ke dalam persediaan modal (Todaro dan Smith, 2011). Investasi menjadi salah satu kata kunci dalam setiap pembicaraan tentang konsep ekonomi. Wacana pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, serta penanggulangan kemiskinan pada akhirnya menempatkan investasi sebagai pendorong utama mengingat perekonomian yang digerakkan oleh konsumsi diakui amat rapuh. (Didi Nuryadin , 2005). Investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru, dalam hal ini akan semakin memperluas kesempatan kerja (Todaro, 2003).

**Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto Di Kabupaten Kepulauan Sula
Tahun 2013-2022**

Tahun	Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto Di Kabupaten Kepulauan Sula
	Pembentukan Modal Tetap Bruto
2013	358929.14
2014	389422.48
2015	422613.60
2016	449649.08
2017	483747.46
2018	462738.06
2019	428053.06
2020	372849.03
2021	268999.95
2022	317287.97

Sumber : BPS Kab. Kep Sula (www.bps.go.id)

Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa perkembangan investasi, atas harga konstan menurut pengeluaran di Kabupaten Kepulauan Sula selama 6 tahun terakhir terlihat belum optimal, dimana investasi menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi tetapi belum bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada saat investasi menunjukkan penurunan, tidak menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi rendah. Fakta ini memberikan informasi yang menarik, apakah investasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sula.

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari setiap keputusan, kebijakan maupun pertimbangan prioritas yang akan diambil oleh pemerintah. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah melakukan pembangunan di berbagai bidang, baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang. Di dalam UUD 1945, ada empat belas kewajiban Negara kepada seluruh rakyat Indonesia. Inti dari kewajiban tersebut adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Tetapi, nyatanya

sampai saat ini hal tersebut belum tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap kemiskinan secara langsung, selanjutnya menganalisis pengaruh kesempatan kerja terhadap kemiskinan serta bagaimana pengaruh estimasi pertumbuhan ekonomi hasil dari analisis variabel investasi dan kesempatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sula.

Kesempatan kerja akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia jika lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau setara dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Salah satu mekanisme pokok pada negara berkembang untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan adalah dengan memberikan upah yang memadai dan menyediakan kesempatan kerja bagi kelompok penduduk miskin (Arsyad, 1997). Secara teoritis kemiskinan yang ada di daerah dipengaruhi berbagai faktor yang diantaranya kesempatan kerja.

Kesempatan kerja merupakan lapangan kerja maupun semua jenis pekerjaan yang telah tersedia bagi tenaga kerja guna memenuhi kebutuhannya. Semakin banyak orang yang telah bekerja maka kesempatan kerja akan semakin luas. Masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Sula sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memperhatikan yang ditandai dengan jumlah pengangguran dan setengah pengangguran yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata, sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya manusia dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, merupakan satu tipe kebijakan republik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.

Kesempatan kerja mempunyai pengertian yaitu kesempatan yang tersedia bagi pekerja dari suatu kegiatan ekonomi, demikian kesempatan kerja dapat pula diartikan sebagai partisipasi pembangunan (Todaro, 2008). Negara berkembang tidak hanya menghadapi masalah kemerosotan dalam ketimpangan realatif tetapi juga masalah kenaikan dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran. Besarnya dimensi kemiskinan tercermin dari jumlah penduduk yang tingkat pendapatan atau konsumsinya berada di bawah tingkat minimum yang sudah ditetapkan. Penduduk miskin biasanya menghadapi masalah utama tentang terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan wanita, serta adanya perbedaan upah.

Tabel 1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Di Kabupaten Kepulauan Sula, (Persen), 2013-2022

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Di Kabupaten Kepulauan Sula, (Persen), 2012-2021	
	Tingkat Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2013	59,34	4,82
2014	59,63	9,67
2015	72,15	3,75
2016	71,34	4,68
2017	45,31	5,86
2018	64,91	5,34
2019	64,80	4,93
2020	59,44	4,90
2021	63,76	2,78
2022	58,29	2,10

Sumber : BPS Kab. Kep Sula (www.bps.go.id)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah Tingkat Angkatan Kerja tertinggi sebesar 72,15 orang pada tahun 2015 dan jumlah

terendah ada pada tahun 2017 sebesar 45,31 orang. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi pada tahun 2014 sebesar 9,67 orang dan jumlah terendah 2,10 pada tahun 2022. Penambahan Tingkat Pengangguran Terbuka ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid 19 yang bukan saja mempengaruhi kesempatan kerja tapi juga dalam hal perekonomian sebab saat covid perekonomian menjadi terhambat, contohnya saja penambahan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2019 sebesar 4,93 orang, artinya Tingkat Angkatan Kerja lebih besar dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka ini merupakan kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan.

Faktor penentu tinggi atau rendahnya tingkat kemiskinan selanjutnya adalah investasi. Investasi adalah fungsi dari pembentukan modal (capital) dan penyerapan tenaga kerja (labor). Pembentukan modal dilakukan untuk memperbesar kapasitas produksi yang akan menaikkan pendapatan nasional ataupun menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Apabila jumlah lapangan kerja semakin banyak akan diikuti dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang terserap, maka akan berpotensi menurunkan jumlah tingkat kemiskinan dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut memiliki makna bahwa semakin tinggi investasi yang ditanamkan maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul; **“Pengaruh Investasi, Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Sula”** apakah mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa investasi, kesempatan kerja akan menurunkan tingkat kemiskinan atau sebaliknya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena masalah yang dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Investasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sula?
2. Apakah Kesempatan Kerja berpengaruh terhadap tingkat kemiskian di Kabupaten Kepulauan Sula?
3. Apakah Investasi dan Kesempatan Kerja berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sula?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Menganalisis pengaruh kesempatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sula.
3. Menganalisis Pengaruh Investasi dan Kesempatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sula

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang mampu memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan pengoptimalisasi informasi bagi pemerintah dalam mengambil keputusan untuk perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sula.
3. Sebagai referensi bagi peneliti yang berminat untuk mengkaji dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.